

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Merujuk pada efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo tahun 2013 hingga 2018 yang didominasi oleh kondisi Sangat Efektif menunjukkan alokasi yang baik dan sesuai peraturan perundang-undangan. Mengingat warga Kabupaten Ponorogo yang mayoritas beragama Islam, ditinjau dari indikator-indikator *falah*, pengukuran efektifitas alokasi dari prinsip keadilan, Pemerintah Ponorogo telah berlaku adil dalam pengalokasian dana PAD secara merata. Prinsip *al-ikhshan* yang dilakukan oleh Pemerintah Ponorogo, dimana dana PAD telah didistribusikan secara baik demi kebaikan masyarakat sehingga tidak ada yang terdzolimi. Prinsip *al-Masuliyah* atau tanggung jawab telah dilakukan oleh Pemerintah Ponorogo dimana pemerintah telah bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya sehingga pengalokasian dana PAD dapat teralokasikan secara maksimal. Prinsip *al-Kifayah* ini pemerintah telah menjatah atau memberikan dana kepada desa yang ada di kabupaten tersebut yang sangat berkecukupan. Prinsip keseimbangan ini pemerintah telah mengalokasikan dana berupa dana bantuan sosial yang salah satunya diurus oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ponorogo guna menjaga keseimbangan bahan pangan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Prinsip kejujuran telah dilakukan oleh Pemerintah Ponorogo dimana pemerintah telah memberikan informasi yang transparan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja yang didapat.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, peneliti memberikan beberapa poin saran membangun kepada berbagai pihak antara lain:

##### **1. Bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo**

- a. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Ponorogo terus melakukan evaluasi kerja demi memaksimalkan potensi yang dikelola. Hal tersebut dilakukan karena kebutuhan masyarakat ponorogo harus terpenuhi dan

juga harus terus menaikan tingkat efektifitas yang sudah terlampaui pada tahun sebelumnya sehingga tidak mengalami kondisi alokasi yang sangat tidak efektif seperti tahun 2013. Dari penelitian ini juga menjadi bahan acuan pengambilan keputusan di bidang pemerintahan serta untuk meninjau kinerja keuangan daerah yang diteliti.

- b. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Ponorogo memaksimalkan potensi yang dimiliki daerahnya dari berbagai aspek kekayaan daerah agar dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki sehingga memaksimalkan alokasi PAD tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu Pemerintah Kabupaten Ponorogo harus wajib memberdayakan masyarakat agar mampu ikut serta dalam memaksimalkan serta menggali potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Ponorogo.

## **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

- a. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan acuan maupun referensi dalam penelitian selanjutnya dengan latar belakang serupa serta mampu mengidentifikasi masalah penelitian secara lebih mendalam.
- b. Peneliti selanjutnya harus dapat memilih permasalahan, latar belakang maupun variabel penelitian yang lebih variatif serta menarik atau dikembangkan dari penelitian ini agar benar-benar dapat menemukan fakta baru di lapangan maupun kajian yang lebih mendalam pada penelitian selanjutnya.